

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori

2.1.1. Sistem Informasi Akutansi

Sistem informasi akutansi adalah sistem yang bertujuan untuk mengumpulkan, memproses data, dan melaporkan informasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan (Lilis, 2011). Pengertian lain dari sistem informasi akutansi adalah sekumpulan perangkat sistem yang berfungsi untuk mencatat data transaksi, mengolah data, dan menyajikan informasi akutansi kepada pihak internal (manajemen keuangan) dan pihak eksternal (pemasok, pembeli, pemerintah, kreditur dan sebagainya) (Winarno, 2006). Jadi, sistem informasi akutansi adalah serangkaian siklus informasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan untuk menyajikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Menurut Romney (2014), terdapat lima komponen yang terdapat di sistem informasi akutansi, yaitu:

- 1) *Orang*, yang mengoperasikan dan melaksanakan berbagai fungsi sistem.
- 2) *Prosedur*, yang berkaitan dengan otomatisasi, mengumpulkan, memproses dan menyimpan data tentang aktivitas organisasi.
- 3) *Data*, berisikan aktivitas proses bisnis.
- 4) *Software*, yang dipakai untuk memproses data organisasi.
- 5) *Infrastruktur teknologi informasi*, instrument pendukung seperti, komputer dan peralatan komunikasi jaringan.

Komponen-komponen sistem informasi akutansi juga memiliki unsur penting, menurut Mardi (2016) menyatakan bahwa pelaku (orang) bertindak sebagai operator sistem atau orang yang mengendalikan dan melaksanakan berbagai fungsi dan prosedur baik manual maupun terotomatisasi, yang dalam kegiatan mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data tentang aktivitas bisnis perusahaan. Sedangkan keberadaan perangkat computer, alat pendukung dan peralatan untuk komunikasi jaringan merupakan infrastruktur teknologi informasi.

Dengan adanya unsur-unsur diatas, memungkinkan sistem informasi akuntansi menjalankan fungsinya yaitu :

- 1) Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi, sumber daya yang dipengaruhi oleh aktivitas-aktivitas tersebut, dan para pelaku yang terlibat dalam berbagai aktivitas tersebut yang memiliki kepentingan untuk meninjau ulang (*review*) hal-hal yang telah terjadi.
- 2) Mengubah data menjadi informasi yang berguna untuk pihak manajemen membuat keputusan dalam aktivitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
- 3) Menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga aset-aset organisasi agar tersedia saat dibutuhkan, akurat dan andal.

Selain menjalankan fungsinya, sistem informasi akuntansi juga memiliki peranan dalam perusahaan terutama perusahaan yang bergerak dalam bidang digital, yang setiap aktivitas dalam perusahaan tersebut mengandalkan internet sebagai dasar strategi bisnis. Penggunaan internet dalam strategi bisnis perusahaan membuat perusahaan lebih efisien dan efektif, sebab terjadi pengurangan biaya serta memudahkan perusahaan dalam melaksanakan setiap aktivitas-aktivitas operasi yang dikerjakan. Penggunaan sistem ini sering disebut dengan Sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP) yaitu sistem yang mengintegrasikan seluruh aspek operasi perusahaan menggunakan SIA (Romney, 2014). Sistem informasi akuntansi memiliki beberapa sistem bagian (*sub-system*) yang berupa siklus transaksi akuntansi. Kelima siklus transaksi akuntansi yaitu : siklus pembiayaan, siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus produksi dan siklus penggajian. Siklus pendapatan terdiri dari semua aktivitas penjualan dan penerimaan kas. Dengan menggunakan sistem ERP, pengaruh siklus penjualan dalam pendapatan akan otomatis terhubung dengan persediaan di gudang, dan pencatatan data non-keuangan lainnya.

2.1.2. Penerimaan kas

Penerimaan kas adalah kas yang diterima oleh perusahaan baik yang berupa uang tunai maupun surat-surat berharga yang mempunyai sifat dapat segera digunakan, yang berasal dari transaksi perusahaan maupun penjualan tunai, pelunasan piutang, atau transaksi lainnya yang dapat menambah kas perusahaan (Mulyadi, 2003). Berdasarkan pengendalian internal yang baik terhadap penerimaan kas dari penjualan tunai, perusahaan perlu memperhatikan :

- a. Penerimaan kas dalam bentuk tunai harus segera disetor ke bank dalam jumlah penuh dengan cara melibatkan pihak lain selain kasir untuk melakukan *internal check*.
- b. Penerimaan kas dari penjualan tunai dilakukan dengan menggunakan transaksi kartu kredit dalam pencatatan transaksi penerimaan kas.

Menurut Mulyadi (2008), Sistem penerimaan kas dari penjualan tunai dibagi menjadi tiga prosedur berikut ini:

- a. Prosedur penerimaan kas dari *over the counter sales*.

Dalam penjualan tunai ini, pembeli datang ke perusahaan, melakukan pemilihan barang atau produk yang akan dibeli, melakukan pembayaran ke kasir, dan kemudian menerima barang yang dibeli. Dalam *over-the counter sales* ini, perusahaan menerima uang tunai, cek pribadi (*personal check*), atau pembayaran langsung dari pembeli dengan *credit card*, sebelum barang diserahkan kepada pembeli (Mulyadi, 2016).

- b. Penerimaan Kas dari COD Sales.

Cash on delivery sales (COD sales) adalah transaksi penjualan yang melibatkan kantor pos, perusahaan angkutan umum, atau angkutan sendiri dalam penyerahan dan penerimaan kas dari hasil penjualan. *COD sales* merupakan sarana untuk memperluas daerah pemasaran dan untuk memberikan jaminan penyerahan barang bagi pembeli dan jaminan penerimaan kas bagi perusahaan penjual (Mulyadi, 2008).

- c. Penerimaan Kas dari *Credit Card Sales*

Sebenarnya *credit card* bukan merupakan suatu tipe penjualan. *Credit card* merupakan sarana pembayaran bagi pembeli, baik dalam *over the counter sales*

maupun dalam penjualan yang pengiriman barangnya dilaksanakan melalui jasa pos atau layanan jasa lainnya. (Mulyadi, 2016).

Jaringan prosedur yang membentuk sistem penerimaan kas dari penjualan tunai menurut Mulyadi (2013) adalah :

1) Prosedur Order Penjualan

Dalam prosedur ini fungsi penjualan menerima order dari pembeli dan membuat faktur penjualan tunai untuk memungkinkan pembeli melakukan pembayaran harga barang ke fungsi kas dan untuk memungkinkan fungsi gudang dan fungsi pengiriman menyiapkan barang yang akan diserahkan kepada pembeli.

2) Prosedur Penerimaan Kas

Dalam prosedur ini fungsi kas menerima pembayaran harga barang dari pembeli dan memberikan tanda pembayaran (berupa pita register kas dan cap “lunas” pada faktur penjualan tunai) kepada pembeli untuk memungkinkan pembeli tersebut melakukan pengambilan barang yang dibelinya dari fungsi pengiriman.

3) Prosedur Penyerahan Barang

Dalam prosedur ini fungsi pengiriman menyerahkan barang kepada pembeli.

4) Prosedur Pencatatan Penjualan Tunai

Dalam prosedur ini fungsi akuntansi melakukan pencatatan transaksi penjualan tunai dalam jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas.

Di samping itu fungsi akuntansi juga mencatat berkurangnya persediaan barang yang dijual dalam kartu persediaan.

5) Prosedur Penyetoran Kas ke Bank

Sistem pengendalian intern terhadap kas mengharuskan penyetoran dengan segera ke bank semua kas yang diterima pada suatu hari. Dalam prosedur ini fungsi kas menyetorkan kas yang diterima dari penjualan tunai ke bank dalam jumlah penuh.

6) Prosedur Pencatatan Penerimaan Kas

Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat penerimaan kas ke dalam jurnal penerimaan kas berdasarkan bukti setor bank yang diterima dari bank melalui fungsi kas.

7) Prosedur Pencatatan Harga Pokok Penjualan

Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi membuat rekapitulasi harga pokok penjualan berdasarkan data yang dicatat dalam kartu persediaan. Berdasarkan rekapitulasi harga pokok penjualan ini, fungsi akuntansi membuat bukti memorial sebagai dokumen sumber untuk pencatatan harga pokok penjualan ke dalam jurnal umum.

Catatan yang digunakan dalam sistem akuntansi penerimaan kas menurut Mulyadi (2013) yaitu:

a. Jurnal Penjualan

Jurnal penjualan digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan meringkas data penjualan.

b. Jurnal Penerimaan Kas

Jurnal penerimaan kas digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat penerimaan kas dari berbagai sumber, diantaranya dari penjualan tunai.

c. Jurnal Umum

Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, jurnal ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat harga pokok produk yang dijual.

d. Kartu Persediaan

Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, kartu persediaan digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat berkurangnya harga pokok yang dijual.

e. Kartu Gudang

Catatan ini tidak termasuk sebagai catatan akuntansi karena hanya berisi data kuantitas persediaan yang disimpan digudang.

Sedangkan dokumen-dokumen yang digunakan untuk melakukan penerimaan kas secara tunai adalah sebagai berikut :

1. Laporan Penerimaan Kas (LPK)

Laporan Penerimaan Kas ini digunakan sebagai lembar pertanggungjawaban yang dibuat oleh bagian kasir yang berisi tentang sejumlah pemasukan kas yang diterima oleh bagian kasir dari penjualan secara tunai.

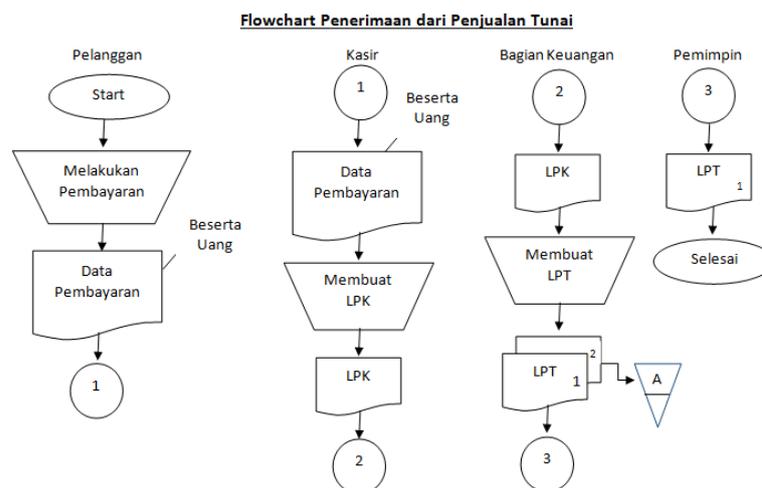
2. Laporan Penjualan Tunai (LPT)

Laporan Penjualan Tunai ini digunakan sebagai lembar pertanggungjawaban pada pimpinan, yang berisi tentang laporan atas penjualan yang telah dilakukan perusahaan dimana penjualan tunai ini, pelanggan membeli produk kepada perusahaan dengan pembayaran secara *cash*, dan laporan penjualan tunai ini dibuat oleh bagian keuangan.

Menurut Mulyadi (2016) aliran data yang terjadi selama penerimaan kas penjualan tunai adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1

Flowchart Penerimaan Kas dari Penjualan Tunai

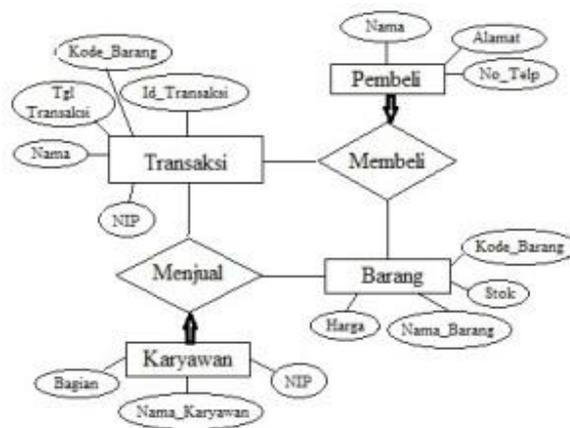


(Sumber : Mulyadi 2016)

Dari gambar diatas, Mulyadi menjelaskan bahwa pelanggan yang merasa cocok dengan produk yang sudah dipilih melakukan pembayaran secara tunai ke

Kasir. Kasir menerima pembayaran tunai (kas) dari Pelanggan. Kemudian kasir membuat Laporan Penerimaan Kas (LPK) dan dikirimkan ke Bagian Keuangan. Bagian Keuangan membuat Laporan Penjualan Tunai (LPT) rangkap 2 dengan ketentuan lembar 1 dikirimkan ke pimpinan dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Maka jika *Entity Relationship Diagram* (ERD) pada penerimaan kas di perusahaan digambarkan adalah sebagai berikut :

Gambar 2.2
ERD pada penerimaan kas



(Sumber : Mulyadi 2016)

2.1.3. Sistem Pembayaran

2.1.3.1. Pengertian sistem pembayaran

Dalam Undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dalam pasal 1 poin ke 6 dijelaskan bahwa Sistem Pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem pembayaran dalam masyarakat harus dapat menjamin terlaksananya perpindahan uang secara efisien dan aman sehingga masyarakat merasa nyaman dalam melakukan setiap transaksi dalam kegiatan ekonomi. Media yang digunakan untuk pemindahan nilai uang tersebut sangat beragam, mulai dari penggunaan alat pembayaran yang sederhana sampai pada penggunaan sistem yang kompleks dan melibatkan berbagai lembaga.

2.1.3.2. Instrumen Pembayaran

2.1.3.2.1. Alat Pembayaran Tunai

Alat pembayaran tunai yang berlaku di Indonesia saat ini adalah uang kartal. Uang kartal merupakan alat bayar yang sah dan wajib diterima oleh masyarakat dalam melakukan transaksi sehari-hari. Uang kartal terdiri dari uang kertas dan uang logam. Namun patut diketahui bahwa pemakaian uang kartal memiliki kendala dalam hal efisiensi. Hal itu bisa terjadi karena biaya pengadaan dan pengelolaan (*cash handling*) terbilang mahal. Hal itu belum lagi memperhitungkan inefisiensi dalam waktu pembayaran. Menyadari ketidak-nyamanan dan inefisien memakai uang kartal, BI berinisiatif dan akan terus mendorong untuk membangun masyarakat yang terbiasa memakai alat pembayaran nontunai atau *Less Cash Society* (LCS).

2.1.3.2.2. Alat Pembayaran Non Tunai

Pembayaran non tunai yang berlaku di Indonesia saat ini adalah uang giral berbasis kertas. Uang giral merupakan tagihan yang terdapat di Bank Umum, yang dapat digunakan sewaktu-waktu. Bentuk uang giral adalah cek, bilyet giro.

2.1.3.2.3. Alat pembayaran *Card-Based*

Card Based Payment merupakan pembayaran dengan menggunakan kartu atau biasa disebut dengan *smartcard*. *Smartcard* merupakan kartu yang memiliki perangkat *chip* kecil yang tertanam di dalamnya. *Smartcard* harus dimasukkan ke dalam *smart card reader* dengan koneksi langsung ke komputer. Pemindahan perintah, data dan status kartu menggunakan kontak fisik. *Card Based payment* terdiri dari Kartu ATM, Kartu Debit, Kartu Kredit dan Kartu Prabayar.

2.1.3.2.4. Alat pembayaran elektronik (*e-payment*)

Pembayaran secara elektronik (*e-payment*) menurut Usman (2017) merupakan sistem pembayaran yang mendukung pada *e-commerce* dan memberi keuntungan pada transaksi bisnis dengan meningkatkan layanan kepada pelanggan, peningkatan proses *cash management*, hemat waktu dan efisien, transaksi pembayaran dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, dengan berbagai media dan tidak terbatas.

Dari penjelasan teori-teori diatas, peneliti akan menghubungkan dengan data-data yang telah diperoleh dari toko Indomarco Prismatama untuk mengetahui pengendalian intern atas penerimaan kas dari *over the counter sales* menggunakan *mobile payment* i.saku. I.saku merupakan instrumen pembayaran non-tunai namun memanfaatkan kecanggihan *smartphone* dalam mengaplikasiannya.

2.1.4. Pengendalian intern

Dengan berkembangnya teknologi informasi, perusahaan diharapkan mampu mengevaluasi setiap pengendalian intern yang telah dijalankan dan perlu memastikan setiap aktivitas yang dilakukan memiliki pengendalian intern masing-masing. Pengendalian internal merupakan rencana dan metode perusahaan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan (Romney, 2014). Pernyataan ini juga didukung oleh Mardi (2016) yang menyatakan bahwa pengendalian internal adalah sistem yang meliputi struktur organisasi beserta semua mekanisme dan ukuran yang dipatuhi bersama untuk untuk menjaga seluruh harta kekayaan organisasi dari berbagai arah. Di dalam melaksanakan tugasnya, pengendalian internal memiliki tiga fungsi penting, yaitu :

- 1) Pengendalian untuk pencegahan

Mencegah timbulnya suatu masalah sebelum terjadi suatu hal yang tidak diinginkan dengan menganalisis resiko yang akan diperoleh, sebab tidak semua masalah mengenai pengendalian dapat dicegah.

- 2) Pengendalian untuk pemeriksaan

Mengungkapkan masalah yang muncul, seperti pengendalian terhadap perhitungan persediaan yang berbeda dengan pencatatan.

- 3) Pengendalian korektif

Memecahkan masalah yang ditemukan oleh pengendalian untuk pemeriksaan. Pengendalian korektif ini menggunakan pendekatan melalui prosedur yang ada, sehingga setiap masalah yang muncul diidentifikasi melalui kesalahan prosedur perusahaan untuk mengetahui pemicu terjadinya kesalahan.

Sistem pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak bagi manajemen, bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya. Tujuan pengendalian intern menurut COSO (*Committee of Sponsoring Organization*) adalah sebagai berikut :

1. Efektivitas dan efisiensi operasi.
2. Reliabilitas pelaporan keuangan.
3. Kesesuaian dengan aturan dan regulasi yang ada.

Selain itu, *Commitee of Sponsoring Organizations* (COSO) juga memiliki komponen-komponen umum yang menjadi pedoman dalam melakukan pengendalian internal (Romney, 2014). Kelima komponen tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Lingkungan pengendalian, merupakan dasar bagi semua komponen *internal control*, menyediakan disiplin, dan struktur. *Control environment* juga menyediakan arahan bagi organisasi dan memengaruhi kesadaran pengendalian dari orang – orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Beberapa faktor yang memengaruhi *control environment* adalah integritas dan nilai etik, komitmen terhadap kompetensi, dewan direksi dan komite audit, gaya manajemen dan gaya operasi, struktur organisasi, pemberian wewenang dan tanggung jawab, serta praktek dan kebijakan sumber daya manusia.
- b. Aktivitas pengendalian, merupakan kebijakan dan prosedur yang menjamin arahan manajemen. Aktivitas tersebut membantu memastikan tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi risiko dalam pencapaian tujuan organisasi. *Control activities* memiliki berbagai tujuan dan diterapkan di berbagai tingkat organisasi dan fungsi. Pada umumnya, *control activities* dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan review terhadap kinerja, pengolahan informasi, pengendalian fisik, serta pemisahan tugas.
- c. Penilaian risiko, merupakan identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuan organisasi serta membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola. Penentuan risiko dari tujuan laporan keuangan adalah identifikasi organisasi, analisis, dan manajemen risiko yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan.

Manajemen risiko menganalisis hubungan risiko yang spesifik terhadap laporan keuangan dengan manajemen dalam laporan keuangan. Risiko dapat timbul atau berubah dikarenakan berbagai hal, diantaranya adalah perubahan dalam lingkungan operasi, personel baru, sistem informasi yang baru atau yang diperbaiki, teknologi baru, lini produk, aktivitas baru, restrukturisasi korporasi operasi luar negeri, dan standar akuntansi baru.

- d. Informasi dan komunikasi, merupakan pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. Sistem informasi yang relevan dalam pelaporan keuangan yang meliputi sistem akuntansi yang berisi metode untuk mengidentifikasikan, menggabungkan, menganalisa, mengklasifikasi, mencatat, dan melaporkan transaksi serta menjaga akuntabilitas aset dan kewajiban. Komunikasi meliputi penyediaan deskripsi tugas individu dan tanggung jawab yang berkaitan dengan struktur *internal control* dalam pelaporan keuangan.
- e. Pengawasan, merupakan proses yang menentukan kualitas kinerja *internal control* sepanjang waktu. *Monitoring* mencakup penentuan desain dan pengendalian operasi tepat waktu serta pengambilan tindakan koreksi. Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara berulang, evaluasi secara terpisah, atau dengan berbagai kombinasi dari keduanya. Di berbagai entitas, internal auditor atau personel yang melakukan pekerjaan yang serupa, memberikan kontribusi dalam memantau aktivitas suatu organisasi. *Monitoring* dapat mencakup penggunaan informasi dan komunikasi dengan pihak eksternal seperti keluhan pelanggan dan respon dari badan pengatur yang dapat memberikan petunjuk tentang masalah atau bidang yang memerlukan perbaikan. Komponen *internal control* tersebut berlaku dalam audit pada setiap organisasi. Komponen tersebut harus dipertimbangkan dalam hubungannya dengan ukuran dari organisasi, karakteristik kepemilikan dan organisasi, sifat bisnis dari organisasi, keberagaman dan kompleksitas operasi pada organisasi, metode yang digunakan oleh organisasi untuk mengirimkan, mengolah,

memelihara, dan mengakses informasi, serta penerapan persyaratan hukum dan peraturan.

Dalam praktiknya, sistem pengendalian intern yang baik dapat dinilai dan dievaluasi dengan memperhatikan setiap komponen-komponen dan tujuan dari perusahaan. Menurut Mardi (2016) yang menyatakan apabila lingkungan pengendalian berjalan dengan baik dalam arti tidak terdapat perangkapan tugas atau penyalahgunaan nilai-nilai perusahaan maka informasi dan komunikasi dalam setiap fungsi atau divisi dapat bekerjasama secara sinergis untuk mencapai tujuan perusahaan yang efektif dan efisien tanpa mengganggu aktifitas-aktifitas operasi lainnya. Kemudian aktivitas pengendalian yang baik terhadap penilaian risiko dapat meminimalkan risiko terhadap reliabilitas atau keabsahan laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan, sebab laporan keuangan yang dibentuk oleh perusahaan dapat mencerminkan sebuah kinerja perusahaan pada pengguna laporan keuangan eksternal. Setelah pembuatan laporan keuangan maka perlu dilakukan pengawasan terhadap setiap aktivitas yang berlangsung sehingga informasi yang disampaikan masih tetap sama dengan kondisi dilapangan dan untuk meninjau ulang aktivitas yang sesuai dengan Standar Operasionalisasi Perusahaan (SOP). Menurut Ribka (2014), menyatakan bahwa pengendalian intern yang menggunakan aplikasi termasuk pada bidang *mobile payment* memiliki beberapa komponen yaitu :

a. Pengendalian atas masukan

Pengendalian masukan dirancang untuk memberikan kepastian yang layak bahwa data yang diterima untuk diproses telah diotorisasi, dikonversi menjadi bentuk yang dapat dibaca mesin, dan diperhitungkan dengan benar. Cara pemrosesan data input antara lain dengan sistem *batch processing*, data diolah dalam satuan kelompok (bundel) dokumen, dan *delayed processing system*, yaitu updating data di komputer tidak sama dengan terjadinya transaksi. Pengendalian input dalam sistem *batch* dilakukan pada tahap:

- 1) *Data Capturing*, proses mengidentifikasi dan mencatat kejadian nyata yang terjadi akibat transaksi yang dilakukan oleh organisasi.
- 2) *Batch Data Preparation*, proses mengubah data yang telah ditangkap kedalam bentuk yang dapat dibaca oleh mesin (*machine readable form*).

3) *Batch data entry*, proses memasukkan data ke komputer.

b. Pengendalian atas pengolahan

Pengendalian intern untuk mendeteksi jangan sampai data (khususnya data yang sesungguhnya sudah valid) menjadi error karena adanya kesalahan proses. Kemungkinan yang paling besar untuk menimbulkan terjadinya *error* adalah kesalahan logika program, salah rumus, salah urutan program, ketidakterpaduan antar subsistem ataupun kesalahan teknis lainnya.

c. Pengendalian atas keluaran

Pengendalian intern untuk mendeteksi jangan sampai informasi yang disajikan tidak akurat, tidak lengkap, tidak mutakhir datanya, atau didistribusikan kepada orang-orang yang tidak berhak. Kemungkinan risiko yang dihadapi yang terkait dengan keluaran ialah seperti telah disebutkan di atas: laporan tidak akurat, tidak lengkap, terlambat atau data tidak *up to date*, banyak item data yang tidak relevan, bias, dibaca oleh pihak yang tidak berhak.

Jadi pengendalian intern menggunakan aplikasi menurut Ribka (2014) dalam pengendalian masukan berhubungan langsung terhadap keyakinan pengguna saat menggunakan produk *mobile payment*, dalam arti lain meyakinkan pengguna bahwa input yang masuk akan diolah komputer bebas dari penyelewengan serta melalui fase validasi sehingga pengguna dapat merasa aman dan perusahaan dapat memastikan bahwa data tersebut telah tercatat dengan baik dan benar. Kemudian untuk pengendalian dalam proses dapat lebih mudah dirasakan perusahaan yaitu penerimaan kas tidak perlu takut adanya kehilangan yang dilakukan oleh pegawai, namun semua penerimaan kas dapat langsung disetor pada bank yang dipercaya oleh perusahaan untuk menerima kas tersebut. Pengendalian keluaran sendiri merupakan proses yang penting karena media untuk penyelesaian sebuah transaksi, apabila transaksi tersebut telah selesai dilakukan maka proses transaksi akan secara otomatis dijurnal kemudian memunculkan hasil penerimaan kas harian yang muncul dalam laporan di komputer maupun di Bank. Sehingga dengan adanya *mobile payment* aktivitas penerimaan kas dapat lebih terkendali dan memudahkan perusahaan dalam mengontrol aktivitas penerimaan kas.

2.1.5. Hubungan Sistem Informasi Akuntansi Dengan Pengendalian Intern

Dalam hal ini sistem informasi akuntansi membantu pengguna sistem atau beberapa fungsi yang terlibat dalam siklus akuntansi untuk menjalankan aktifitasnya menjadi lebih efektif. Keefektifan sistem informasi yang ada dalam perusahaan mampu menghubungkan setiap fungsi untuk saling berkomunikasi dan bertukar informasi mengenai aktifitas perusahaan. Pengendalian intern juga memerlukan data-data yang diperoleh dari aktifitas perusahaan yang telah terhubung dan terstruktur, sehingga sistem informasi akuntansi perusahaan yang baik dapat memudahkan evaluasi setiap aktifitas yang menghasilkan keputusan untuk melakukan pengendalian intern perusahaan. Namun dalam kasus toko Indomarco Primatama pengendalian internal yang diteliti menggunakan *mobile payment* dalam aktifitas penerimaan kas sehingga langsung terhubung dengan komputer, dalam hal ini perusahaan dapat memperhatikan hal-hal berikut ini untuk melakukan pengendalian intern :

a. Ketersediaan

Tersedia untuk digunakan dan dioperasikan dengan memberikan pernyataan pada setiap pelayanan.

b. Keamanan

Memiliki akses fisik dan memiliki otorisasi untuk membantu mencegah penggunaan yang tidak sesuai serta pencurian sumber daya sistem.

c. Dapat dipelihara

Memperbaiki sistem apabila terjadi perubahan sifat penggunaan pada beberapa data tertentu, namun perubahan tidak secara cepat diubah namun menunggu prosedur yang ada dan membutuhkan persetujuan manajemen untuk melakukan perubahan.

d. Integritas

Pemrosesan sistem bersifat lengkap, akurat, tepat waktu dan diotorisasi.

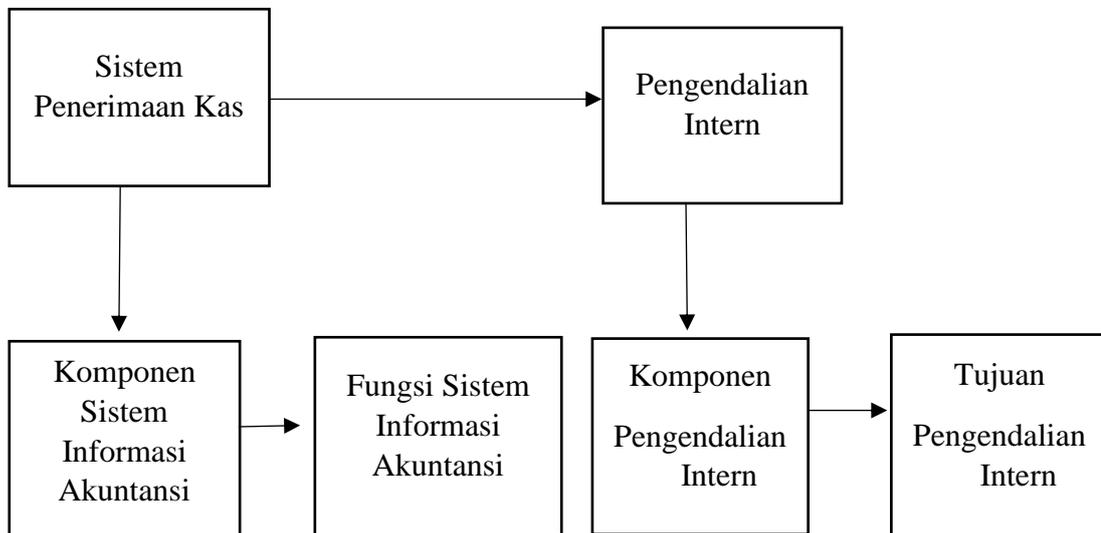
2.2. Penelitian Terdahulu

Nama (tahun)	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
Ranita Margaretha (2013)	Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pada PT. Sinar Galesong Prima Cabang Manado	Metode deskriptif	PT. Sinar Galesong Prima telah memisahkan fungsi penerimaan kas sesuai dengan unsur pengendalian intern. Namun praktik sehat di unsur pengendalian intern untuk pengeluaran kas masih belum berjalan dengan baik
Fajar Dwi Setyawan (2013)	Analisis Sistem Informasi Akutansi Penjualan dan Penerimaan Kas Pada CV. Sakinah Farmindo Makmur	Metode Deskriptif	Secara umum prosedur, fungsi bagian dan dokumen yang ada masih sangat kurang dan lemah dan mengakibatkan sistem pengendalian internalnya belum efektif. Selain itu, dokumen yang digunakan sebagai alat informasi

			belum cukup bisa membantu manajemen dalam pengambilan keputusan.
Arfianty Arfan (2018)	Analisis Penerapan Electronic Data Processing (EDP) System dalam Pengolahan Data Penjualan dan Penerimaan Kas Pada PT Hadji Kalla Cabang Parepare	Metode Deskriptif	Seluruh fungsi terhubung dengan baik dan data langsung tersimpan sehingga jaringan komputer yang digunakan PT Hadji Kalla Cabang Parepare telah memadai sehingga telah mendukung pencapaian informasi akuntansi yang memadai.
Fransiscus Octavianus (2016)	Analisis Sistem Informasi Akutansi Siklus Penjualan dan Penerimaan Kas Untuk Meningkatkan Pengendalian Intern Pada PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk.	Metode Deskriptif	Alur proses penjualan dan penerimaan kas sudah sesuai dengan sistem informasi akutansi, namun dalam pengoperasiannya terdapat kesalahan dan kelemahan

	(Alfamart) Cabang Manado		dalam aktivitas pengendalian intern
Sinta Dwi Prana Dewi (2015)	Analisis Sistem dan Prosedur Akutansi Penjualan dan Penerimaan Kas Dalam Upaya Meningkatkan Pengendalian Intern (Studi Kasus Pada PT. Enseval Putra Megatrading Tbk Malang)	Metode Deskriptif	Sistem penjualan kredit serta penerimaan kas yang diterapkan secara keseluruhan sudah cukup menunjang pengendalian intern dikarenakan unsur- unsur pengendalian intern sebagian besar telah terpenuhi, namun ada beberapa dokumen atau pencatatan yang kurang sesuai dengan unsur pengendalian intern serta terdapat fungsi-fungsi yang tidak seharusnya mengerjakan bagian tersebut.

2.3. Kerangka Pemecahan Masalah



Sistem informasi akuntansi perusahaan memiliki beberapa fungsi yang saling berkaitan salah satunya yaitu penerimaan kas dan pengendalian intern, kedua fungsi ini saling berkaitan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan serta efektivitas aktivitas-aktivitas yang terdapat dalam perusahaan tersebut. Apabila pengendalian intern menggunakan cara manual untuk mengawasi dan memantau penerimaan kas, maka manajemen membutuhkan waktu yang lama untuk membuat keputusan atas pengendalian penerimaan kas, sedangkan saat ini teknologi informasi telah berkembang sehingga perusahaan dapat menggunakan media untuk melakukan pengendalian intern yang lebih efektif dan lebih tepat. Penggunaan *mobile payment* dalam pengendalian penerimaan kas dapat memudahkan pengguna untuk proses pengolahan data hingga penyajian data. Oleh karena itu, penggunaan *i.saku* merupakan pilihan toko Indomarco Primatama untuk mudah menganalisis dan mengawasi pengendalian intern yang tepat. Penelitian ini akan menggambarkan sistem penerimaan kas yang dilakukan dengan *mobile payment*, yang akan dilihat dari terpenuhinya komponen-komponen sistem penerimaan kas yang diukur melalui fungsi yang ada. Kemudian melihat terpenuhinya komponen-komponen pengendalian intern toko Indomarco Primatama melalui tujuan perusahaan sebagai alat pengukur.